

## Analisis Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung

### Analysis of the Contribution of Regional Revenue Components to the Government of Bitung Capital Expenditure Allocation

Faisal Humiang<sup>1</sup>, Hendrik Manossoh<sup>2</sup>, Peter Kapojos<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia  
Email : [faisalhumiang@gmail.com](mailto:faisalhumiang@gmail.com)

**ABSTRACT-** Regional revenue or regional revenue is money that goes to the regional treasury or more based on the regulation of the Minister of Home Affairs. Article 17 Paragraph (1) Regional revenue consists of regional revenue and financing revenue. Regional revenue is the right of the regional government which is recognized as an addition to net asset value. Meanwhile, financing receipts are all receipts that are paid back and / or expenditures that will be received back, both in the related fiscal year and in subsequent fiscal years. Regional revenue is a very important revenue for local governments in supporting regional development in order to finance regional projects and activities. This study aims to determine how much the contribution of each component of regional revenue to the city government spending of Bitung. The method used in this research is descriptive qualitative method.

**Keywords :** Regional revenue, Capital Expenditure

ABSTRAK-Pendapatan daerah atau pendapatan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah atau lebih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 17 Ayat (1) Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pendapatan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah dalam rangka membiayai proyek dan kegiatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap belanja pemerintah kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Pendapatan Daerah, Belanja Modal

#### 1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, membawa implikasi tersendiri dalam proses pembangunan di daerah, yaitu dengan adanya perubahan pola penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Otonomi daerah diyakini merupakan cara terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah menggantikan sistem pembangunan terpusat (sentralisasi) yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besar ketimpangan antar daerah. Urusan wajib/kewenangan yang begitu luas diserahkan ke daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan, sedangkan bila daerah mengandalkan penerimaan dan pendapatan asli daerah atau PAD maka membiayai seluruh urusan wajib yang diserahkan pemerintah tersebut masih sangatlah kurang, untuk itu perlu adanya dana pusat yang diserahkan ke daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan

baik vertikal maupun horizontal dan dana tersebut dalam peraturan perundang-undangan dinamakan dana perimbangan. Sesuai dengan namanya, dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan itu meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ketiga jenis dana tersebut bersama (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah di Indonesia. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah harus meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari PAD dan DAK. Otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai institusi yang memiliki tanggungjawab besar dalam upaya pencapaian tujuan bernegara. Salah satu instrumen sekaligus faktor penting bagi keberhasilan pembangunan daerah adalah manajemen belanja daerah, yang tercermin melalui APBD.

Pada tahun 2015-2019 Pendapatan Asli daerah Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Bitung mengalami peningkatan, namun peningkatan disetiap tahun ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya peningkatan kontribusi belanja modal. Pemerintah Kota Bitung dalam mengelola anggaran keuangannya diberikan kewenangan penuh dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. PAD, DAK, DAU, dan DBH yang merupakan sumber penerimaan dalam APBD yang dinilai masih kurang memberikan kontribusi lebih ke belanja modal yang merupakan belanja/pengeluaran, yang terlihat di laporan APBD.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka judul penelitian terhadap Penerimaan Daerah Kota Bitung adalah **“Analisis Kontribusi Penerimaan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bitung”**.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Sistem Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan dan tunduk pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Akuntansi pemerintahan merupakan suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan) secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dengan tujuan agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan dan pemantauan terhadap penggunaan dana. Adapun pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut

Bachtiar Arif dkk (2002:3) adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut.

## 2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Penerimaan rutin daerah yang berasal dari pungutan (pajak, retribusi) dan hasil dari perusahaan daerah lainnya serta hasil usaha daerah yang sah. Carunia dkk (2017:119) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

## 2.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Alokasi DAU terdiri dari beberapa, yaitu :

1. DAU dialokasikan untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.
2. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
3. Proporsi DAU untuk Daerah Provinsi dan untuk Kabupaten atau Kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten Kota.

## 2.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah. Alokasi DAK per Daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan alokasi penetapan DAK dimaksud, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Mekanisme pengalokasian DAK, yaitu :

## 2.5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam UU No 28 Tahun 2010 sebagian diperuntukan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
- c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
- d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%

## 2.6. Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk oprasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu :

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- c. Belanja Modal Gedung dan Pembangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembuatan dan perawatan juga termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

## 2.7. Kajian Penelitian Terdahulu

Sari dan Wirama (2018) dengan judul Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan positif terhadap alokasi Belanja Daerah.

Priabudi (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013, hasil penelitian menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Ernayani (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Ayu (2018) dengan judul Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat menemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan terjadi Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kontribusi dari komponen penerimaan daerah yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Bitung.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Periode pengamatan untuk hasil penelitian ini adalah selama kurun waktu pembuatan skripsi bulan Mei 2021 sampai dengan selesai.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan kasubag keuangan tentang gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung serta mengenai kontribusi dari tiap-tiap komponen penerimaan daerah terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Bitung. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, yaitu Laporan APBD terhitung dari tahun 2015-2019.

#### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Observasi

#### **3.5. Metode Analisis Data**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Proses analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data berupa gambaran umum instansi dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2015-2019, serta data lain berupa hasil wawancara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bitung.
2. Mempelajari tentang penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
3. Menganalisis data tentang Laporan Realisasi APBD yang dikhususkan pada komponen penerimaan daerah yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH tahun 2015-2019 yang telah dikumpulkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung, dengan cara melakukan perhitungan rasio dimana total dari setiap komponen penerimaan daerah akan dibagi dengan total belanja dan dikalikan 100%. Kemudian memastikan kesesuaian kontribusi dari setiap komponen penerimaan daerah.
4. Memberikan kesimpulan dari hasil analisis tentang Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2019 serta memberikan saran atau masukan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung untuk pengelolaan APBD diperiode berikut.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil penelitian

##### Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	96.000.000.000,00	103.133.530.054,00
2016	97.390.399.677,00	82.910.970.810,00
2017	116.232.245.700,00	122.773.221.957,00
2018	115.506.028.957,00	109.653.370.127,00
2019	88.888.966.842,00	88.194.541.966,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung 2021

Berdasarkan Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 pencapaiannya melebihi target pada tahun 2015 dan tahun 2017 sedangkan tahun 2016, 2018 dan 2019 Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2015 realisasi pendapatan asli daerah Kota Bitung sebesar Rp103.133.530.054,00 turun menjadi Rp82.910.970.810,00 ditahun 2016. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 menjadi Rp122.773.221.957,00. Tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp109.653.370.127,00 dan Rp. 88.194.541.966,00

##### Realisasi Dana Bagi Hasil ( DBH ) Kota Bitung

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	22.700.000.000,00	15.983.321.603,00
2016	23.615.769.000,00	28.257.851.824,00
2017	23.830.174.000,00	57.160.199.212,00
2018	95.638.402.000,00	91.620.573.850,00
2019	103.489.707.521,00	82.426.371.914,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung 2021

Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target terjadi di tahun 2016 dan 2017 sedangkan tahun 2015, 2018 dan 2019 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2015 Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Bitung sebesar Rp15.983.321.603,00 naik menjadi Rp28.257.851.824,00 ditahun 2016. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi Rp57.160.199.212,00 dan Rp91.620.573.850,00. Tahun 2019 turun menjadi Rp82.426.371.914,00

##### Realisasi Dana Alokasi Umum ( DAU ) Kota Bitung

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	437.048.958.000,00	437.048.958.000,00
2016	482.867.542.000,00	482.867.542.000,00
2017	474.591.814.000,00	474.591.814.000,00
2018	476.935.367.000,00	476.896.658.000,00
2019	515.696.268.000,00	522.576.244.000,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung 2021

Berdasarkan Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target tahun 2019 dan pada tahun 2018 tidak mencapai target sedangkan pada tahun 2015,2016, 2017 memenuhi target.

#### **Realisasi Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Kota Bitung**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

**Tabel 4. Realisasi Alokasi Khusus (DAK) Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	50.670.430.000,00	50.670.430.000,00
2016	195.666.790.000,00	167.525.467.970,00
2017	150.312.193.000,00	145.231.247.739,00
2018	211.596.335.000,00	203.284.399.558,00
2019	129.321.516.000,00	121.052.244.537,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung 2021

Berdasarkan Tabel 4. di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berfluktuasi dengan pencapaian memenuhi target tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 – 2019 tidak mencapai target.

#### **Realisasi Belanja Modal Kota Bitung**

Realisasi Belanja Modal Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

**Tabel 5. Realisasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	176.147.989.104,-	171.232.907.302,-
2016	230.135.598.155,-	222.967.119.701,-
2017	207.376.591.670,-	200.434.060.632,-
2018	318.956.021.633,-	302.908.372.352,-
2019	245.476.739.320,-	222.697.263.274,-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung 2021

Berdasarkan Tabel 5. di atas menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Modal Kota Bitung tahun anggaran 2015 – 2019 berfluktuasi dengan realisasi melebihi target tahun 2018 sedangkan tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 realisasi belanja modal Kota Bitung tidak melebihi dari target yang dianggarkan.

## **4.2. Pembahasan**

### **Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Modal**

**Tabel 6. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi BM (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	103.133.530.054,00	171.232.907.302,00	60.23	Sangat Baik
2016	82.910.970.810,00	222.967.119.701,00	37.18	Cukup Baik
2017	122.773.221.957,00	200.434.060.632,00	61.25	Sangat Baik
2018	109.653.370.127,00	302.908.372.352,00	36.20	Cukup Baik
2019	88.194.541.966,00	222.697.263.274,00	39.60	Cukup Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Perhitungan Tabel 6. diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019 bervariasi antara 36,60 % sampai dengan 61,25 %. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 61,25 % dan terendah pada tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 36,20 %. Pada tahun 2015 kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah pada alokasi Belanja Modal sebesar 60,23 % sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 37,18 %. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 39,60 %, dibanding tahun 2018. Dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 46,89%, membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi dengan kriteria baik pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung.

#### Kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap alokasi Belanja Modal

**Tabel 7. Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Realisasi DBH (Rp)	Realisasi BM (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	15.983.321.603,00	171.232.907.302,00	9.33	Sangat Kurang
2016	28.257.851.824,00	222.967.119.701,00	12.67	Kurang
2017	57.160.199.212,00	200.434.060.632,00	28.51	Sedang
2018	91.620.573.850,00	302.908.372.352,00	30.25	Cukup Baik
2019	82.426.371.914,00	222.697.263.274,00	37.01	Cukup Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Perhitungan Tabel 7. diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019 mengalami peningkatan antara 9,33% sampai dengan 37,01%.

Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 37,01% dan terendah pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 9,33%. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada alokasi Belanja Modal sebesar 12,67 % sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 28,51%. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 30,25%,.

Dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 23,55%, membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan kontribusi dengan kriteria sedang pada alokasi belanja modal kota Bitung.

#### Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Modal

**Tabel 8. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Realisasi DAU (Rp)	Realisasi BM (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	437.048.958.000,00	171.232.907.302,00	254.65	Sangat Baik
2016	482.867.542.000,00	222.967.119.701,00	216.56	Sangat Baik
2017	474.591.814.000,00	200.434.060.632,00	236.78	Sangat Baik
2018	476.896.658.000,00	302.908.372.352,00	157.44	Sangat Baik
2019	522.576.244.000,00	222.697.263.274,00	234.66	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Perhitungan Tabel 8. diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019 berfluktuasi antara 157.44% sampai dengan 254.65%.

Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 254.65% dan terendah pada tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 157.44%. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan Dana Alokasi Umum (DAU) pada alokasi Belanja Modal sebesar 216.56% sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 236.78%. Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 234.66%,.

Dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 220.02%, membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi dengan kriteria sangat baik pada alokasi belanja modal kota Bitung.

### Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal

**Tabel 9. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Realisasi DAK (Rp)	Realisasi BM (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	50.670.430.000,00	171.232.907.302,00	29.59	Sedang
2016	167.525.467.970,00	222.967.119.701,00	75.13	Sangat Baik
2017	145.231.247.739,00	200.434.060.632,00	72.46	Sangat Baik
2018	203.284.399.558,00	302.908.372.352,00	67.11	Sangat Baik
2019	121.052.244.537,00	222.697.263.274,00	54.36	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Perhitungan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019 berfluktuasi antara 29.59% sampai dengan 75.13%.

Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 75.13% dan terendah pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 29.59%. Pada tahun 2017 kontribusi yang diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada alokasi Belanja Modal sebesar 72.46% sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 67.11%. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 54.36%,. Dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 59.73%, membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi dengan kriteria sangat baik pada alokasi belanja modal kota Bitung.

### Perbandingan Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah terhadap alokasi Belanja Modal

**Tabel 10. Perbandingan Kontribusi Komponen Penerimaan Daerah pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019**

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD (%)	Kontribusi DBH (%)	Kontribusi DAU (%)	Kontribusi DAK (%)
2015	60.23	9.33	254.65	29.59
2016	37.18	12.67	216.56	75.13
2017	61.25	28.51	236.78	72.46
2018	36.20	30.25	157.44	67.11
2019	39.60	37.01	234.66	54.36
<b>Rata-rata</b>	<b>46,89</b>	<b>23,55</b>	<b>220.02</b>	<b>59.73</b>
<b>Kriteria</b>	<b>Baik</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 10. diatas dapat dilihat bahwa kontribusi komponen Penerimaan Daerah terhadap alokasi Belanja Modal kota Bitung pada tahun anggaran 2015-2019 rata-rata masih di dominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kriteria sangat baik meskipun kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal berada pada kriteria baik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komponen penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi dengan kriteria baik pada alokasi Belanja Modal Kota Bitung sebesar 60%.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan kontribusi dengan kriteria sedang pada alokasi belanja modal kota Bitung sebesar 37%.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi dengan kriteria sangat baik pada alokasi belanja modal kota Bitung sebesar 70%.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi dengan kriteria sangat baik pada alokasi belanja modal kota Bitung sebesar 75%.
5. Kontribusi komponen Penerimaan Daerah terhadap alokasi Belanja Modal kota Bitung pada tahun anggaran 2015-2019 rata-rata masih di dominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kriteria sangat baik meskipun kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal berada pada kriteria baik.

## 5.2. Saran

Saran untuk penelitian ini :

Pemerintah Kota Bitung disadari masih bergantung pada penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai belanja daerah khususnya dalam belanja modal

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B, Muchlis., dan Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Ayu, P. P. 2018. *Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat*. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri 3(1): 2541-0180.
- Carunia, M Firdausy, dan Idawati, R. 2017. *Kebijakan dan strategipeningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasioanl*. Jakarta: Yayasan Pustaka.
- Ernayani, R. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)*. Jurnal Sosial Humaniora 1(1): 2580-5398.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., and Warfield, T. D. 2015. *Intermediate Accounting Volume 1*. Edisi Kedua Belas. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 15 September 2005. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Jakarta.
- Priabudi, W 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana AlokasiUmum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013*. Jurnal Nominal 6(1): 136-147.
- Sari, D. M. M. Y. dan Wirama, D. G. 2018. *Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal denganPendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 22(3): 2065-2087.
- Sholikhah, I dan Agus, W. 2014. *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/KotaDi Jawa*. AAJ 3(4): 553-56